

# BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Disampaikan pada  
Workshop E-learning

Oleh : Tatik Rohmawati, S.IP.  
Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan



# DEMOKRASI

## Pengertian Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah ‘kekuasaan rakyat’.

# PENGERTIAN DEMOKRASI

- **Abraham Lincoln**, *Democracy is government from the people by the people and for the people.*
- **Kartini Kantono**, "Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan".
- **Sukarna**, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
- **Joseph A. Schmeter**, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- **Sidney Hook**, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- **Affan Gaffar (2000)** memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara *normatif* (demokrasi normatif) dan *empirik* (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

# SEJARAH & PERKEMBANGAN DEMOKRASI

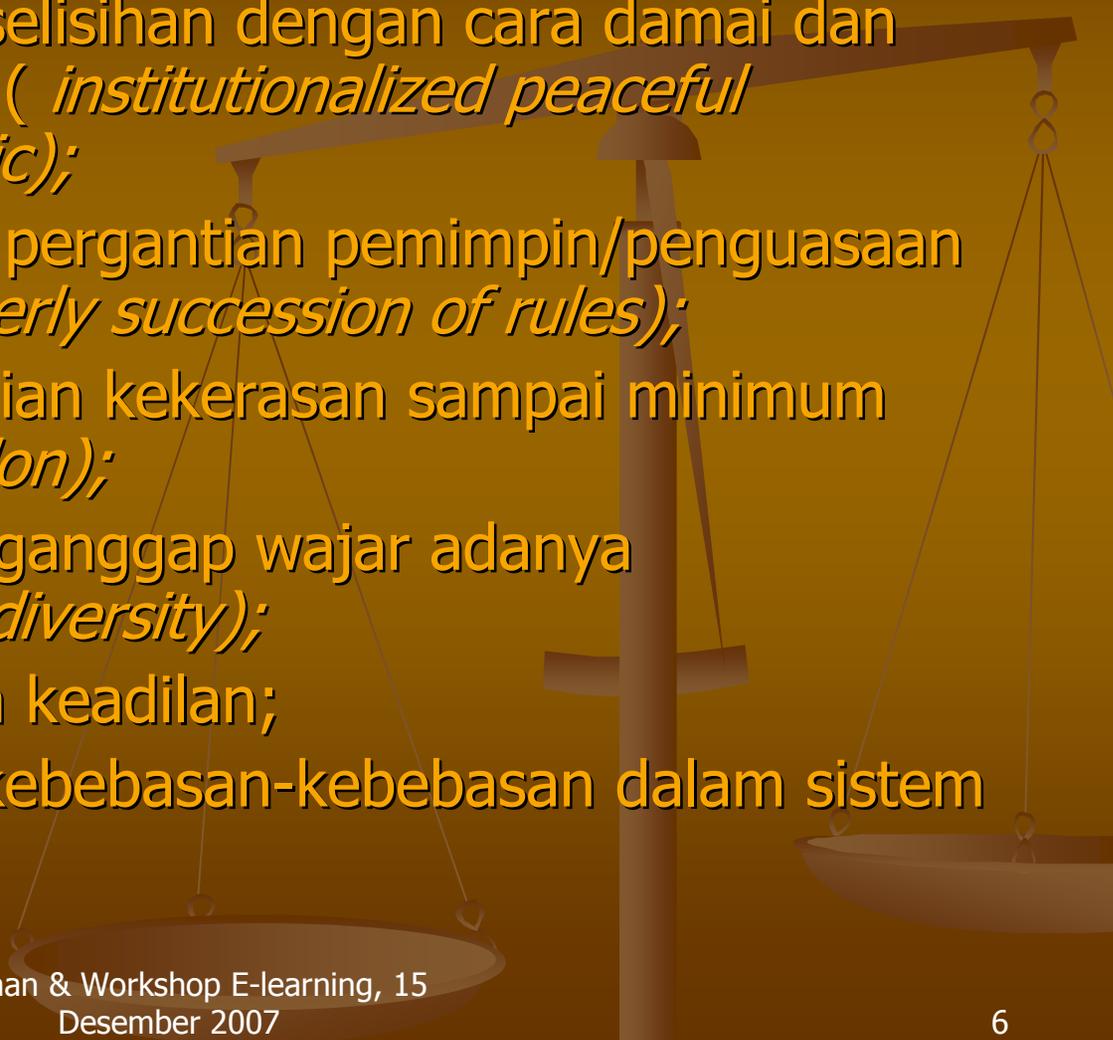
Teori dari **John Locke** dan **JJ. Rosseau**.  
Kontrak sosial dapat terwujud melalui 2  
tahap/cara, yakni:

- Perjanjian Masyarakat: perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat.
- Perjanjian Pemerintah: perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan.

# KARAKTERISTIK DEMOKRASI

- Pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- Pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat.
- Tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama/tinggi dibandingkan individu lainnya.
- Pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak.

# NILAI-NILAI DEMOKRASI



- Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- Menyelenggarakan pergantian pemimpin/penguasaan secara teratur (*orderly succession of rules*);
- Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*);
- Menjamin tegaknya keadilan;
- Menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi.

# PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

- ❖ Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- ❖ Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik, semakin luas.



# PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

- Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.
- Periode 1999-sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu.

# TERIMA KASIH

